

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Implementasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah untuk Mewujudkan Akuntabilitas Di Pemerintahan Kota Kediri dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar hukum pelaksanaan SIMDA sendiri terlaksana sesuai dengan dasar hukum yang berlaku yaitu Undang – undang dan Peraturan mengenai *E-government* dan pengelolaan keuangan daerah. Dimana hal tersebut terdapat pada Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011, serta Peraturan Walikota Kediri Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) dilingkungan Pemerintah Kota Kediri.

Sedangkan proses pelaksanaan program SIMDA keuangan berawal dari adanya sosialisasi oleh pemerintah pusat yaitu pelaksana teknisnya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dalam pelaksanaannya SIMDA untuk mempermudah dalam pembuatan pertanggungjawaban pelaporan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja. Sebagai sarana administrasi pelaksanaannya berupa aplikasi yang berupa program-program yang mendukung kegiatan pengisian pertanggungjawaban. Proses pelaksanaan SIMDA sendiri juga berkoordinasi dengan instansi lain yaitu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berperan sebagai pendamping, pelatih dan pengawas serta bertanggung jawab pada pelaksanaan SIMDA berlangsung.

2. Implementasi program SIMDA keuangan berbasis teknologi informasi untuk menciptakan akuntabilitas administrasi di pemerintahan Kota Kediri khususnya di Bidang Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Kediri menunjukkan hasil yang positif. Dimana laporan-laporan administratif yang telah dibuat menciptakan akuntabilitas administratif secara hierarkis, melalui prosedur administratif yang baik dan struktur pertanggungjawaban yang dilakukan sudah cukup jelas. Selain itu dalam akuntabilitas politik yang telah dilaksanakan juga menunjukkan pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar operasional. Dimana pertanggungjawaban berupa laporan pertanggung jawaban (LPJ) yang diberikan kepada pemilik kekuasaan (administrator) yaitu walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selaku pemegang jabatan

politik yang didapat dari legitimasi dari publik. Serta dalam akuntabilitas publik penyampaian pertanggungjawaban berupa buku peraturan walikota tentang rincian anggaran dan penjabaran anggaran. Berkaitan dengan penyampaiannya berupa buku masyarakat harus berpartisipasi secara aktif untuk menanyakan kepada satuan kerja terkait penggunaan anggaran yang ingin diketahui sebagai bentuk pengawasan penggunaan anggaran publik. Dengan kata lain bahwa akuntabilitas politik dan akuntabilitas publik yang dijalankan masih bersifat administratif, dikarenakan masih sekedar berkas yang diberikan berupa laporan kepada pihak yang berada pada pusat-pusat pertanggungjawaban.

3. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah untuk Mewujudkan Akuntabilitas Administrasi Di Pemerintahan Kota Kediri yaitu faktor pendukungnya berupa : Landasan hukum yang jelas, Sarana dan prasarana yang memadai, Dukungan dana dari APBD instansi yang terkait. Sedangkan faktor penghambatnya adalah jaringan internet yang tersendat, faktor alam dan faktor sumber daya manusia sebagai operator teknis yang masih belum keseluruhan mampu untuk menjalankan aplikasi yang ada.

B. Saran

1. Perlu adanya pengembangan program aplikasi yang sudah dimiliki, yang digunakan sebagai sarana mempermudah pelaksanaan administratif yang dibutuhkan. Serta penguatan koordinasi agar dalam pengisian pelaporan

yang akan dibuat dapat dilaksanakan secara maksimal. Dimana dalam pelaksanaan yang ada akan selalu mendapat pengawasan dari pihak terkait selaku penanggungjawab.

2. Terhadap penyampaian akuntabilitas publik diperlukannya suatu penyampaian pertanggungjawaban yang berada pada intirnet. Dimana pemerintah Kota Kediri agar membuat website khusus mencangkup pertnggungjawaban mengenai pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut dikarenakan masyarakat yang semakin modern akan kemahiran penggunaan teknologi informasi baik melalui Handphone ataupun lewat komputer. Pengawasan dari publik (masyarakat) akan semakin meningkat dan lebih mudah.
3. Perlu adanya pelatihan terus menerus terhadap sumber daya manusia yang dimiliki oleh Bidang Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Kediri. Hal tersebut berguna agar pelaksanaan SIMDA dapat berjalan dengan maksimal serta agar satuan kerja yang bertugas sebagai operator dapat selalu mengikuti perkembangan program SIMDA yang terus mengalami pengembangan.